

Tata Kelola Program Mudik Gratis sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Publik di Sulawesi Tenggara

Muhamad Rajulan¹⁾, Maudhy Satyadharna²⁾, Hado³⁾, Nasrul⁴⁾, Sylsiani Mursalim⁵⁾

^{1,2}Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, ³Universitas Sulawesi Tenggara, ⁴Universitas Halu Oleo
⁵Institut Mekongga

email: muhamadrajulan@yahoo.com¹, maudhymaudhy@gmail.com², hasinaunsultra@gmail.com³,
nasrul@uho.ac.id⁴, Sylsianimursalim@gmail.com⁵

(Diterima Januari 2026); Disetujui Februari 2026); Dipublikasikan Maret 2026)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tata kelola program mudik gratis terhadap kualitas pelayanan transportasi publik di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif serta analisis regresi linier sederhana. Sampel penelitian berjumlah 99 responden yang merupakan pengguna layanan mudik gratis tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan, dengan koefisien regresi sebesar 0,964 dan nilai determinasi sebesar 60,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik tata kelola yang diterapkan, maka kualitas pelayanan transportasi publik juga semakin meningkat. Temuan ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarinstansi dalam meningkatkan efektivitas program mudik gratis, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal, aman, nyaman, dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Mudik Gratis, Kepuasan, Kualitas Pelayanan, Tata Kelola

Abstract

This study aims to analyze the influence of the governance of the free homecoming program on the quality of public transportation services in Southeast Sulawesi Province. The study used a quantitative approach with descriptive methods and simple linear regression analysis. The sample consisted of 99 respondents who were users of the free homecoming service in 2026. The results showed that governance had a positive and significant effect on service quality, with a regression coefficient of 0.964 and a determination value of 60.7%. This indicates that better governance improves the quality of public transportation services. These findings emphasize the importance of transparency, accountability, and inter-agency coordination in increasing the effectiveness of the free homecoming program, thus ensuring optimal, safe, and comfortable service delivery and sustainably increasing public satisfaction.

Keywords: Free Homecoming, Satisfaction, Service Quality, Governance

PENDAHULUAN

Mobilitas masyarakat pada periode hari raya, khususnya saat arus mudik, selalu mengalami peningkatan signifikan (Mahdar & Satyadharma, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai tantangan dalam penyediaan layanan transportasi publik, seperti keterbatasan kapasitas angkutan, tingginya biaya perjalanan, serta potensi risiko keselamatan perjalanan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa mobilitas masyarakat dapat berlangsung secara aman, nyaman, dan terjangkau melalui kebijakan transportasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (La Ode et al., 2024; Saputra et al., 2023).

Salah satu bentuk kebijakan pelayanan publik di sektor transportasi adalah penyelenggaraan program mudik gratis yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas (Karlista & Tukiman, 2025). Program ini tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi (Wicaksono & Abadi, 2025). Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan telah melaksanakan program mudik gratis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dengan moda transportasi yang disediakan oleh pemerintah secara gratis atau bersubsidi. Antusiasme masyarakat terhadap program ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan transportasi publik yang terjangkau dan berkualitas masih sangat tinggi (Rajulan, 2026).

Namun demikian, keberhasilan program mudik gratis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan armada transportasi, tetapi juga oleh tata kelola program yang efektif (Ramadanti et al., 2023). Tata kelola yang baik mencakup aspek perencanaan, koordinasi antarinstansi, pengelolaan sumber daya, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan program (Fahmi, 2025; Suriadi, 2025). Tanpa tata kelola yang baik, program mudik gratis berpotensi menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kuota, distribusi layanan yang tidak merata, kurangnya koordinasi antar stakeholder, serta keterbatasan informasi kepada masyarakat (Waspada.id, 2026). Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola pelayanan publik menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas layanan yang diterima masyarakat (Akhyar, 2023; Mursalim et al., 2025; Rahmawati & Tjenreng, 2025). Menurut Janet V. Denhardt (Abbas & Sadat, 2020), pelayanan publik modern menekankan pada upaya pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, pengelolaan program mudik gratis perlu dianalisis dalam kerangka tata kelola pelayanan publik untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat (Afandi, 2026).



Gambar 1 Flyer Kegiatan Mudik Gratis Bersama ASR Tahun 2026
Sumber : Dishub Sultra (2026)

Selain itu, tata kelola kebijakan publik juga berkaitan dengan proses koordinasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan program, seperti pemerintah daerah, operator transportasi, aparat keamanan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan (Satyadharma & Susanti, 2024). Koordinasi yang baik antar stakeholder menjadi kunci dalam memastikan program mudik gratis dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (Supriansyah et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana tata kelola program mudik gratis dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik tata kelola program mudik gratis serta menjadi dasar bagi perumusan strategi peningkatan pelayanan transportasi publik di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait tata kelola kebijakan transportasi publik dan pelayanan publik.

METODE

Analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari responden. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui distribusi jawaban, kecenderungan nilai rata-rata, serta tingkat persepsi responden terhadap variabel tata kelola dan kualitas pelayanan transportasi publik. Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran umum mengenai bagaimana responden menilai indikator-indikator yang diteliti, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Populasi penelitian ini adalah para penerima layanan Mudik Gratis bersama ASR Tahun 2026 yaitu sebanyak 13572 orang. Penelitian menggunakan rumus sampling Slovin dengan

persentase 10 persen, sehingga sampel penelitian berjumlah 99 orang. Pengumpulan data kuisioner dilakukan dari tanggal 13-20 Maret 2026

Adapun data responden penelitian ini akan diuraikan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1 Data Karakteristik Responden Penelitian

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
A. Jenis Kelamin			
1.	Laki-Laki	50	51
2.	Perempuan	49	49
	Jumlah	99	100
B. Usia Responden			
1.	Dibawah 25 Tahun	69	70
2.	25-40 Tahun	15	15
3.	40 Tahun Keatas	15	15
	Jumlah	99	100
C. Pendidikan			
1.	SMP dan SMA	30	30
2.	D3 dan S1	60	61
3.	S2	9	9
	Jumlah	99	100
D. Pekerjaan			
1.	Pelajar/Mahasiswa	75	76
2.	Pekerja Swasta	20	20
3.	PNS/TNI/Polri	4	4
	Jumlah	99	100

Sumber : Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan Tabel 1, karakteristik responden menunjukkan komposisi yang cukup representatif dalam mendukung hasil penelitian. Dari sisi jenis kelamin, distribusi responden relatif seimbang antara laki-laki (51%) dan perempuan (49%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat dominasi gender tertentu, sehingga persepsi yang dihasilkan lebih objektif dan mencerminkan pandangan yang beragam dari masyarakat.

Dari aspek usia, responden didominasi oleh kelompok usia di bawah 25 tahun sebesar 70%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penelitian lebih banyak merepresentasikan generasi muda yang cenderung memiliki mobilitas tinggi serta lebih aktif dalam memanfaatkan layanan transportasi publik. Sementara itu, kelompok usia 25–40 tahun dan di atas 40 tahun masing-masing sebesar 15%, yang menunjukkan adanya partisipasi dari kelompok usia produktif dan dewasa meskipun dalam proporsi yang lebih kecil.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki latar belakang D3 dan S1 (61%), diikuti oleh SMP/SMA (30%) dan S2 (9%). Hal ini menandakan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik dalam menilai aspek pelayanan. Dari sisi pekerjaan, responden didominasi oleh pelajar/mahasiswa (76%), diikuti pekerja swasta (20%) dan PNS/TNI/Polri (4%). Dominasi ini menunjukkan bahwa pengguna utama transportasi publik khususnya dalam arus mudik yang menjadi sampel penelitian adalah kalangan muda dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	7.077	2.890	2.449	.016
	X	.964	.079	.779	12.236

a. Dependent Variable: Y

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 7.077 dan koefisien regresi variable Tata Kelola (X) nilainya sebesar 0.964.

Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi di atas, maka rumus persamaan regresinya adalah :

$$Y = 7.077 + 0.964X$$

Persamaan regresi linier ini dapat diberi makna sebagai berikut :

- Nilai konstanta 7.077 artinya Kualitas Pelayanan Transportasi Publik sebesar 7.077 satuan, bila variabel Tata Kelola diabaikan atau dianggap konstan/tetap.
- Nilai koefisien regresi Tata Kelola (X) 0.964 dengan nilai t sebesar 12,236 dan tingkat signifikan uji-t (p-value) sebesar 0,000 (< 0,05). hasil ini membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Transportasi Publik secara signifikan akan meningkat sebesar 0.964 satuan jika Tata Kelola naik sebesar 1 satuan .

Uji Keberartian Model Regresi

Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas X yaitu Tata Kelola terhadap Kualitas Pelayanan Transportasi Publik. Berikut ini di sajikan *output model summary* SPSS 26 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.779 ^a	.607	.603	2.727

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 3, koefisien r sebesar 0.779 berarti Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Transportasi Publik memiliki pengaruh positif, sedangkan R² (koefisien determinasi) adalah sebesar 0.607. Ini berarti variabel Tata Kelola (X) dapat menjelaskan Kualitas Pelayanan Transportasi Publik (Y), dengan kontribusi sebesar 60.7% sedangkan sisanya sebesar 39.3% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier, diperoleh persamaan $Y = 7.077 + 0.964X$ yang menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel Tata Kelola (X) dengan Kualitas Pelayanan

Transportasi Publik (Y). Persamaan ini memberikan gambaran bahwa tata kelola memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Nilai konstanta sebesar 7.077 mengandung makna bahwa ketika variabel Tata Kelola dianggap tidak mengalami perubahan atau dalam kondisi tetap, maka Kualitas Pelayanan Transportasi Publik tetap berada pada angka 7.077 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tanpa adanya peningkatan tata kelola, masih terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kualitas pelayanan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, maupun faktor teknis operasional lainnya. Namun demikian, nilai konstanta ini juga mengindikasikan adanya baseline pelayanan yang sudah terbentuk dalam sistem transportasi publik.

Selanjutnya, koefisien regresi Tata Kelola sebesar 0.964 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Tata Kelola akan diikuti dengan peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Publik sebesar 0.964 satuan. Nilai ini tergolong tinggi dan mendekati angka 1, yang berarti hubungan antara kedua variabel sangat kuat dan searah. Artinya, semakin baik tata kelola yang diterapkan, maka kualitas pelayanan transportasi publik juga akan semakin meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Radja (2025) yang menyimpulkan bahwa tata kelola transportasi public yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar mampu mendorong layanan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Hasil uji t memperkuat temuan tersebut, dimana nilai t hitung sebesar 12.236 jauh lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1.660 pada taraf signifikan 5%. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa pengaruh Tata Kelola terhadap Kualitas Pelayanan Transportasi Publik terbukti signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H1) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola merupakan faktor determinan yang memiliki pengaruh nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik.

Lebih lanjut, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0.779 yang menandakan adanya hubungan yang kuat antara variabel Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Transportasi Publik. Sementara itu, nilai R² sebesar 0.607 mengindikasikan bahwa sebesar 60.7% variasi dalam Kualitas Pelayanan Transportasi Publik dapat dijelaskan oleh variabel Tata Kelola. Angka ini menunjukkan kontribusi yang cukup besar, sehingga dapat dikatakan bahwa tata kelola merupakan faktor utama dalam model penelitian ini. Namun demikian, masih terdapat sebesar 39.3% variasi yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Faktor-faktor lain di luar tata kelola memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan transportasi publik secara menyeluruh. Kualitas sumber daya manusia, misalnya, sangat memengaruhi profesionalisme dan responsivitas petugas dalam melayani masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi transportasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi informasi, serta kemudahan akses layanan bagi pengguna. Tingkat kepuasan pengguna juga menjadi indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pelayanan yang diberikan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur yang memadai akan menunjang kelancaran operasional transportasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan seluruh faktor pendukung tersebut.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh kuat dan signifikan antara tata kelola terhadap kualitas pelayanan transportasi publik memberikan implikasi yang sangat strategis, khususnya dalam penyelenggaraan program mudik gratis oleh pemerintah. Tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta pengawasan yang akuntabel. Dalam konteks mudik gratis, hal ini tercermin pada proses pendaftaran yang transparan, kejelasan informasi kepada masyarakat, serta ketepatan jadwal keberangkatan dan kedatangan.

Hubungan positif antara tata kelola dan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa peningkatan pada aspek tata kelola akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini menjadi penting karena program mudik gratis tidak hanya bertujuan untuk membantu mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang harus memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan keandalan. Dengan tata kelola yang baik, potensi permasalahan seperti penumpukan penumpang, keterlambatan, maupun ketidaksesuaian data dapat diminimalisir.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Atmaja dan Hidayat-Sardini (2024) yang menyatakan bahwa tata kelola yang efektif mampu meningkatkan kualitas pelayanan pada moda transportasi BRT Cirebon. Artinya, prinsip-prinsip tata kelola yang baik bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai jenis layanan transportasi, termasuk program mudik gratis.



Gambar 2 Suasana Program Mudik Gratis Tahun 2026 di Pelabuhan Baubau
Sumber : Dishub Sultra (2026)

Dalam perspektif program mudik gratis, tata kelola yang baik mencakup transparansi pendaftaran, kejelasan kuota, ketepatan jadwal, serta koordinasi antar instansi dan operator transportasi. Jika aspek-aspek ini dikelola secara optimal, maka pelayanan mudik tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Hal ini selaras dengan tujuan utama program Mudik Gratis, yaitu membantu masyarakat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan terjangkau (Nugraha & Manggalou, 2024; Wicaksono & Abadi, 2025). Selain itu, kontribusi tata kelola yang cukup besar dalam menjelaskan kualitas pelayanan transportasi menunjukkan bahwa perbaikan manajemen program mudik gratis menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, implementasi tata kelola yang baik akan mendukung terwujudnya tagline Arus Mudik 2026, yaitu “Mudik Aman Keluarga Bahagia”, dimana aspek

- Mahdar, & Satyadharma, M. (2023). Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 pada Pelabuhan Penyeberangan Baubau dan Pelabuhan Penyeberangan Waara. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, 15(02), 100–108. <https://doi.org/10.38041/jikom1.v15i02.286>
- Mursalim, S., Sulisty, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Media Framing of Freight Transportation Policy During the Christmas 2025 and New Year 2026 Period. *Islamic Business and Management Journal*, 8(2), 378–385. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/IBMJ/article/view/15752>
- Nugraha, H. A., & Manggalou, S. (2024). Program Pelayanan Bantuan Mudik Bareng Gratis Puspa Agro. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelita Nusantara*, 2(2), 56–61. <https://doi.org/10.69688/jpmp.v2i2.188>
- Radja, J. (2025). Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam Reformasi Tata Kelola Transportasi Publik guna Mewujudkan Layanan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan. *Magister Research*, 4(2), 23–32. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/MARS/article/view/866>
- Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313–323. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>
- Rajulan, M. (2026). Semangat Ramadhan: Bekal Positif Bagi Insan Perhubungan Dalam Pelayanan Arus Mudik Optimal. *Mediatama Sultra*. <https://mediatamasultra.com/semangat-ramadhan-bekal-positif-bagi-insan-perhubungan-dalam-pelayanan-arus-mudik-optimal/>
- Ramadanti, F. G., Kamaliyah, A., Madhiyah, A., & Mafaza, A. (2023). Analisis Strategi dan Peran PT Jasa Raharja Jawa Timur Sebagai Koordinator Program Mudik Gratis Tahun 2022 Dalam Mengurangi Tingkat Kecelakaan Ditinjau Dari Angka Pemberian Santunan Kecelakaan. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 6(2), 204–220. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/MANOVA/article/view/1461>
- Saputra, Y. J., Ahmad, S., & Satyadharma, M. (2023). Pengaruh Kualitas Jasa Layanan Terminal Pelabuhan Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Feri di Pelabuhan Penyeberangan Baubau. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 204–217. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.1082>
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>
- Supriansyah, S., Adiarto, A., & As'ari, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Mudik Kebangsaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Tahun 2024. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 5507–5513. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13736>
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54. <https://suriaacademicpress.com/ojs/index.php/safa/article/view/12>
- Waspada.id. (2026). *Program Mudik Gratis Tuai Protes, Dishub Perbaiki Sistem dan Tingkatkan Transparansi*. <https://www.waspada.id/kesehatan/program-mudik-gratis-tuai-protes-dishub-perbaiki-sistem-dan-tingkatkan-transparansi/>
- Wicaksono, H. S. B., & Abadi, T. W. (2025). Billboard Media as Public Communication for Mudik Gratis Participation: Media Billboard Sebagai Sarana Komunikasi Publik Untuk Partisipasi Dalam Program Mudik Gratis. *House of Wisdom: Journal on Library and Information Sciences*, 2(3). <https://doi.org/10.21070/how.v2i3.262>